

Sei Baru Tewu

Menuju Konsep Desa Berkelanjutan
Desa Sei Baru Tewu, Kec. Maluku
Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah



Sei Baru Tewu

Menuju Konsep Desa Berkelanjutan

Desa Sei Baru Tewu, Kec. Maluku, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Penyusun

Bambang Parlupi

Hermanus

Foto

Hermanus, Desa Sei Baru Tewu

Disain & Tata letak

Roy Candra Yudha

Produksi

Yayasan Sekolah Alam Digital

November, 2020



Sei Baru Tewu

Menuju Konsep Desa Berkelanjutan

Desa Sei Baru Tewu, Kec. Maluku, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Yayasan Sekolah Alam Digital

November, 2020



Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Pendahuluan | 5 |
| Desa Berkelanjutan, Upaya Membangun Desa Mandiri | 5 |
| BAB 1. Membangun Agrowisata, Membangun <i>Sustainable Village</i> | 7 |
| Prinsip Pengembangan Desa Wisata | 7 |
| Membangun Desa yang Berkelanjutan | 10 |
| BAB 2. Menuju Desa yang Berkelanjutan dengan Konsep SLA | 12 |
| Pendekatan Sustainable Livelihood Approach dalam Perencanaan | 12 |
| Peran Masyarakat dalam Membentuk Desa Berkelanjutan | 15 |
| BAB 3. Profile Desa Sei Baru Tewu | 18 |
| Sejarah Desa | 19 |
| BAB 4. Potensi Desa | 21 |
| Modal Alam | 21 |
| Modal Manusia | 27 |
| Modal Fisik | 28 |
| Modal Sosial | 30 |
| Modal Dana | 33 |
| BAB 5. Strategi dan Peran serta Masyarakat | 36 |
| Peranan Pembangunan Masyarakat dalam Membentuk Desa Berkelanjutan | 36 |
| Tantangan dan Strategi Desa Mandiri | 37 |
| Strategi Membangun Kawasan Pedesaan | 41 |
| Pembuatan Sketsa Desa | 42 |
| Daftar Pustaka | 45 |

Pendahuluan



Desa Berkelanjutan, Upaya Membangun Desa Mandiri

Pembangunan yang berkelanjutan dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan-kegiatan di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa sekarang tanpa membahayakan daya dukung sumberdaya bagi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Tantangan pembangunan berkelanjutan adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana.

Dikutip dalam literatur www.sustainable.org, pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) adalah strategi dimana masyarakat mencari ekonomi pendekatan pembangunan yang juga menguntungkan lingkungan dan kualitas hidup setempat. Pembangunan berkelanjutan menyediakan kerangka kerja dimana masyarakat dapat menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien, membuat infrastruktur yang efisien, melindungi dan meningkatkan lingkungan dan kualitas hidup, dan menciptakan bisnis baru untuk memperkuat mereka ekonomi. Hal tersebut dapat membantu menciptakan komunitas sehat yang dapat menopang generasi yang akan datang.



Jalan Desa Sie Tewu Baru

Di era arus globalisasi yang semakin kuat, maka harus diimbangi pula dengan kesadaran dalam memecahkan masalah ketimpangan sumberdaya alam. Kebijakan pembangunan harus memberi perhatian lebih tentang perlunya menata kembali landasan sistem pengelolaan aset-aset di wilayah, terutama di pedesaan. Penataan kembali kawasan tersebut lebih berupa integrasi kepada pemanfaatan ganda, yaitu peningkatan nilai ekonomi, pelestarian lingkungan atau ekosistem serta memperkuat tatanan sosial serta budaya lokal.

Dimasa yang akan datang, dalam konteks pembangunan pedesaan yang berkelanjutan atau mewujudkan Desa Berkelanjutan (*sustainable village*), pengelolaan sumberdaya di desa haruslah dilaksanakan dalam satu pola yang menjamin kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keseimbangan biologis. Dalam mempertahankan kelestarian alam dan memperbaiki kualitas sumberdaya alam dapat diterapkan model pemanfaatan sumberdaya yang efisien dan berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan di kawasan pedesaan secara nasional terkait dengan penetapan bagaimana, di mana, dan kapan perkembangan manusia terjadi, yang memengaruhi penggunaan sumber daya alam. Dalam menyusun rencana pembanguan desa, sangat penting berorientasi ke dalam meningkatkan keberlanjutan hidup masyarakat desa. Konsep *Sustainable Village* dapat mempertahankan fungsi desa yang lebih kuat yaitu sebagai penyedia dan sebagai cadangan pangan nasional serta mempertahankan kualitas ekologi setempat.

Untuk itu, dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya penyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun faktanya, penyediaan infrastruktur desa tidak menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional sehingga kualitas kehidupan di pedesaan tidak meningkat bahkan semakin menurun.



Pembuatan Patung Sapundu

Salah satu hal dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan diperlukan pengembangan desa mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Desa mandiri yaitu desa yang dapat memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar dan kebutuhan pokok, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara berkelanjutan yaitu menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Pola pembangunan manusia, fisik, sosial, dan ekonomi sangat mempengaruhi keberlanjutan di tingkat lokal maupun secara global.

Desa mandiri dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa tersebut antara lain pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata alam atau desa sebagai destinasi wisata dan lain sebagainya. Salah satu potensi peningkatan ekonomi bagi warga desa, kawasan desa dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata atau desa wisata. Potensi sumber daya alam yang alami, adat istiadat masyarakat yang masih terjaga serta kehidupan masyarakat desa yang masih sederhana dapat dijadikan sebagai aset untuk pengembangan wisata alternatif.

BAB 1.

Membangun Agrowisata, Membangun *Sustainable Village*



Prinsip Pengembangan Desa Wisata

Indonesia memiliki 74.000 desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap desa memiliki potensi yang sangat berbeda satu sama lainnya. Untuk itu, sangat diperlukan pembangunan pedesaan yang dikelola baik dan berkelanjutan. Tujuannya agar masyarakat desa mampu mandiri, mengelola sumberdaya alam dengan baik dan berkelanjutan serta dapat meningkatkan sumber pendapatan warga deaa. Lapangan pekerjaan di desa akan meningkat seras sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui konsep pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Desa Berkelanjutan (*Sustainable Village*) dapat mempertahankan fungsi desa yang lebih kuat yaitu sebagai penyedia dan sebagai cadangan pangan nasional serta mempertahankan kualitas lingkungan yang alami. Salah satu, konsep dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan diperlukan pengembangan desa mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Desa mandiri yaitu desa yang dapat memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar, dan kebutuhan pokok, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara berkelanjutan.



Desa mandiri dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa tersebut antara lain pertanian, peternakan, pertambangan, pariwisata alam atau desa sebagai destinasi wisata dan lain sebagainya. Salah satu potensi peningkatan ekonomi bagi warga desa, kawasan desa dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata atau desa wisata.

Sejak beberapa tahun belakangan ini, pengembangan perekonomian desa di era modern banyak yang diarahkan pada desa wisata. Tren saat ini, masyarakat kota sangat menggemari kegiatan wisata alternatif seperti wisata alam (ekowisata dan agrowisata) atau berwisata sambil belajar tentang kehidupan masyarakat desa dan belajar tentang pertanian di pedesaan.



Untuk mewujudkan dalam prosesnya, sebuah kawasan desa wisata atau desa dengan konsep agrowisata harus memenuhi 4 prinsip pembangunan pariwisata desa. Pembangunan objek wisata baru tersebut tidak hanya berhenti pada jangka pendek saja melainkan dapat terus dikembangkan dimasa mendatang. Berikut adalah ke empat prinsip yang harus dipenuhi:

1. Economically Feasible

Dalam bahasa Indonesia berarti layak secara ekonomi. Prinsip pertama ini wajib dipenuhi sebelum memutuskan bahwa sebuah desa akan dibangun atau dikembangkan menjadi sebuah kawasan wisata. Pemilihan lokasi desa yang memenuhi prinsip yang pertama ini pun harus disepakati oleh warga dan didukung oleh pemerintah daerah setempat.

Beberapa contoh lokasi yang memenuhi prinsip *Economically Feasible* adalah desa yang memiliki nilai wisata unik atau sebelumnya sudah memiliki kekhasan tertentu yang bisa dibangun atau dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah lokasi wisata. Sebagai contoh misalnya, konsep agrowisata di pedesaan atau wisata agro (pertanian dan hasil pasca panen) yang menjadi andalan utama warga desanya. Potensi tersebut akan menjadi andalan utama sebagai daya tarik orang untuk datang.

2. *Environmentally Feasible*

Yaitu menekankan bahwa segala bentuk pembangunan dan pengembangan desa menjadi sebuah desa wisata harus memperhatikan kondisi alam dan lingkungan serta perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi. Mengapa *Environmentally Feasible* menjadi salah satu prinsip yang harus dipenuhi? Alasannya adalah karena pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dan perkembangannya harus yang mengarah pada proses jangka panjang. Kesalahan perencanaan dalam langkah pembangunan bisa merusak alam atau lingkungan sekitar yang nantinya juga akan memberikan dampak pada kualitas dan kuantitas desa wisata tersebut di masa mendatang.

3. *Socially Acceptable*

Hal tersebut berarti dapat diterima oleh penduduk atau warga desa setempat. Tanpa adanya dukungan warga desa setempat atau penduduk asli, maka akan ada nilai-nilai lokal yang nanti kemudian akan hilang. Nilai-nilai yang ada serta norma-norma yang telah dihormati secara turun-temurun tersebutlah yang nantinya akan memberikan kekayaan tersendiri bagi suatu desa wisata, seperti rencana menjadi desa agrowisata. Tanpa adanya prinsip ini, dikhawatirkan akan terjadi benturan antara warga serta pengunjung pariwisata dikemudian hari. Sehingga tak heran apabila prinsip pembangunan pariwisata desa, seperti Desa Agrowisata seperti ini dianggap penting.

4. *Technologically Appropriate*

Teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan juga jaringan telekomunikasi seperti internet dan sosial media di era digital ini, juga harus menjadi perhatian penting bagi penduduk desa agar tidak ketinggalan dalam wawasan serta perkembangan global. Oleh karena itulah, prinsip pembangunan pariwisata desa juga harus memberikan fokus terhadap penerapan teknologi “hijau” dalam mencapai pengembangan yang secara ekologis, ekonomis, efisien dalam energi, dan juga berorientasi jangka panjang. Dengan adanya sosial media (Medsos) seperti WA grup, facebook, Instagram, twitter, youtube dan lain-lain dapat menjadi media promosi yang murah, luas dan efektif saat ini. Bila jaringan medsos mampu dikuasai serta dikelola dengan bijaksana, akan memberikan dampak kunjungan bagi para wisatawan dalam dan luar negeri serta pengembangan desa wisata.

Itulah beberapa prinsip pembangunan pariwisata desa yang perlu diperhatikan dan juga diterapkan. Dengan adanya prinsip tersebut, maka proses pembangunan menuju desa agrowisata akan lebih terencana dengan baik dan berkelanjutan. Dengan menekankan prinsip pembangunan desa berkelanjutan melalui terjaganya ekologi dengan seimbang, pelestarian seni budaya serta kesederhanaan kehidupan masyarakat desa yang harus dijaga. Selain itu, dengan konsep desa agrowisata juga mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi di masyarakat, meningkatnya hasil panen menuju desa yang sejahtera, mandiri, adil dan makmur.

Membangun Desa yang Berkelanjutan

Pembangunan adalah milik seluruh anggota masyarakat dan bukan milik pemerintah. Pembangunan yang direncanakan dengan pendanaan dari pusat bersifat relatif sementara, manakala kemampuan masyarakat dan daerah belum mampu merencanakan dan membiayai sendiri pembangunannya. Oleh karena itu, jika suatu saat masyarakat dan daerah telah mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan sendiri melalui pendapatan asli daerahnya, maka pemerintah perlu mengurangi campurtangannya pada sektor-sektor yang penting dan menentukan hidup rakyat banyak.



Jalan Desa Sie Tewu Baru

Oleh karena itu pembangunan perlu mempersiapkan masyarakat untuk menggantikan peranan ini dengan sebesar-besarnya mengikutsertakan seluruh anggota masyarakat. Kerjasama perlu dijalin antar pelaku ekonomi pengusaha kuat dengan masyarakat yang masih tertinggal. Kerjasama di antara para pelaku ekonomi ini merupakan cermin dari cita-cita terlaksananya pembangunan yang mandiri dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan terciptanya kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan berarti pembangunan perdesaan akan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Desa Berkelanjutan (*Sustainable Village*) merupakan suatu gerakan yang dilakukan secara nasional dan merupakan upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Pembangunan perdesaan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kriteria:

1. Mengikutsertakan semua anggota masyarakat (rakyat) dalam setiap tahap pembangunan. Kriteria ini mengharuskan setiap anggota masyarakat harus dan kesempatan berusaha sesuai
2. Setiap anggota masyarakat dengan pengorbanannya, yang berarti yang menghasilkan adalah juga yang menikmati dan mendapatkan manfaat sesuai dengan kemampuannya dalam menghasilkan.
3. Adanya tenggang rasa di antara anggota masyarakat yang berarti bahwa mendapatkan kesempatan bekerja bidang dan kemampuan masing-masing, harus mendapatkan imbalan sesuai selalu menjaga keseimbangan antara yang kuat dengan yang lemah dan yang kaya dengan yang miskin yang dicerminkan dalam rasa kebersamaan yang saling menguntungkan. Dengan demikian adanya kontrol pembangunan merupakan kondisi tercapainya pembangunan yang berlanjut tersebut.

Keberhasilan program desa yang berkonsep *Sustainable Village* ditentukan oleh adanya kepedulian aktif seluruh masyarakat, motivasi penduduk untuk meningkatkan kesejahteraannya, dukungan aparat perencana dan pelaksanaan yang penuh dedikasi. Peran serta aktif berbagai pihak sangat diperlukan baik dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pers, maupun unsur masyarakat lain yang mendorong dan menunjang keberhasilan program.

Sebagai suatu strategi pembangunan pada satu sisi dalam program ini terkandung moral pembangunan bahwa pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, adanya pemihakan kepada penduduk miskin di desa tertinggal, serta terselenggaranya koordinasi program pembangunan prasarana dan sarana

yang diarahkan untuk membuka keterisolasian, dan meningkatkan peran serta dan produktivitas rakyat dalam kegiatan sosial ekonomi.

Sejalan dengan anggapan itu maka pembangunan sesungguhnya adalah proses yang berorientasi pada manusianya. Dengan memberikan perhatian pada unsur manusianya, maka indikator sosial yang dalam hal ini tidak semata diukur dengan tercapainya tingkat produksi rata-rata yang tinggi saja tetapi terciptanya keadaan yang benar-benar dinikmati oleh setiap anggota masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada manusianya (*human development orientation*) mengutamakan pada paling tidak tiga unsur penting yakni, aspek kehidupannya (*human life*), pengetahuan, dan tingkat hidup yang memadai.

Pembangunan yang berorientasi pada unsur manusianya berarti pula mempersiapkan manusia untuk ikut aktif dalam proses pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable*). Hal itu berarti pembangunan yang diciptakan dari masyarakat sendiri, oleh masyarakat dan untuk semua masyarakat. Dengan demikian setiap anggota masyarakat harus ikut serta dalam setiap tahap pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kerangka di atas pembangunan masyarakat desa diarahkan untuk mentransformasikan struktur kegiatan sosial, ekonomi dan kelembagaan yang semula bercorak subsisten, tradisional dan agraris menuju pada struktur ekonomi bercorak perkotaan, modern dan industri. Dinamika yang terjadi dalam proses tersebut ditandai dengan perembesan struktur dan budaya moderen ke dalam struktur dan budaya perdesaan sehingga akan terjadi perluasan proses modernisasi ke seluruh masyarakat.

Sebagai akibatnya struktur dan kebudayaan tradisional yang menguasai daerah perdesaan mulai mengalami transformasi mengantarkan terjadinya tahapan di mana perbedaan-perbedaan struktural dan kultural antara kota dan desa menjadi semakin menyempit. Dalam kondisi itu masyarakat desa berhasil mengembangkan suatu kehidupan ekonomi, politik dan budaya yang semakin rasional. Akhirnya antara desa dan kota terpola suatu hubungan timbal balik yang harmonis dan saling dapat menciptakan surplus bagi pertumbuhan masyarakat keduanya.



BAB 2.

Menuju Desa yang Berkelanjutan dengan Konsep SLA



Pendekatan *Sustainable Livelihood Approach* dalam Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), adalah sebuah rencana pembangunan desa yang disusun untuk mendorong pembangunan desa selama masa pemerintahan kepala desa yang menjabat dalam periode 6 (enam) tahun. Hal tersebut secara legal tertuang dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana pembangunan desa yang berorientasi membentuk perencanaan Desa Berkelanjutan (*sustainable village*) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dalam menyediakan sumber daya, baik itu dalam bentuk dana, serta sumber daya alam yang tersedia.



Saat proses penyusunan RPJM Desa, menggunakan pendekatan partisipatif sehingga kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dan dipakai sebagai acuan prioritas dalam kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan. Informasi dan data akurat tentang kehidupan masyarakat dan wilayah desa dapat dipakai untuk melakukan kajian *Sustainable Livelihood Approach* (SLA) atau Pendekatan Penghidupan Lestari (PPL). Analisa itu, digunakan sebagai dasar menyusun visi dan misi kelompok usaha atau desa, yang dituangkan dalam sebuah rencana strategi kelompok atau desa.

Hasil pengkajian PPL tersebut disusun menjadi sebuah pernyataan untuk mencapai penghidupan yang lebih baik yang dituangkan dalam sebuah perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Kemudian hasil perumusan secara kelompok tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen RPJM Desa. Upaya pendekatan partisipatif merupakan prinsip dalam penyusunan RPJM Desa untuk lebih mengerti dan mampu menyampaikan proses yang berjalan secara terbuka kepada warga lain yang tidak terlibat. Dengan

demikian SLA atau PPL merupakan alat analisa untuk menemukan serta menggambarkan masalah dan potensi yang ada di suatu desa atau wilayah tertentu.

Diperlukan pemahaman dasar yang perlu diketahui tentang PPL, yaitu tentang aset atau modal. Ada lima komponen dalam aset yang harus diketahui dan dianalisa. Modal tersebut merupakan data yang sangat penting dalam penyusunan RPJM-Desa sebagai upaya membentuk konsep *sustainable village*, desa yang mandiri, desa yang kuat ketahanan pangannya. Kelima modal dalam kajian SLA yaitu:

a. Modal Alam

Modal alam adalah kategori aset penghidupan yang sangat berkelanjutan. Modal alam diistilahkan sebagai modal sumber daya alam dan isinya, seperti pepohonan, tanah, udara bersih, ekosistem pesisir, air bersih, hutan, gunung, laut dan sebagainya. Modal ini dapat dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, tanah dan pohon memberikan manfaat langsung dengan berkontribusi terhadap pendapatan dari hasil pertanian dan perasaan masyarakat tentang kesejahteraan. Manfaat tidak langsung yang mencakup siklus nutrisi, penyerapan polusi, perlindungan dari erosi dan sebagainya.

b. Modal Manusia

Modal manusia merupakan kategori aset penghidupan, berupa keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja, dan kesehatan yang baik yang bersama-sama memungkinkan orang untuk mengejar strategi penghidupan yang berbeda dan mencapai hasil mata pencaharian mereka. Pada tingkat rumah tangga modal manusia adalah faktor dari jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia. Hak ini sangat bervariasi, sesuai dengan ukuran rumah tangga, tingkat keterampilan, pendidikan, potensi kepemimpinan, status kesehatan dan sebagainya. Modal manusia sangat diperlukan, untuk dapat memanfaatkan empat jenis aset penghidupan yang lain.



c. Modal Sosial

Modal sosial adalah kategori aset penghidupan yang terkait dengan hubungan formal dan informal sosial (atau sumber daya sosial) dalam berbagai kesempatan dan manfaat yang dapat diambil oleh orang-orang dalam mengupayakan penghidupan yang layak. Sumber daya sosial dikembangkan melalui investasi dalam bentuk interaksi, yaitu melalui kerja atau kepentingan bersama yang meningkatkan kemampuan orang untuk bekerja bersama-sama.

Sumber daya sosial yang berikutnya adalah keanggotaan kelompok yang lebih formal di mana hubungan diatur oleh aturan dan norma-norma yang berlaku. Adanya hubungan kepercayaan merupakan bentuk modal sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan memfasilitasi kerjasama, mengurangi biaya transaksi dan kadang-kadang membantu dalam pengembangan jaring pengaman informal di antara orang miskin. Manfaat penting dari modal sosial yaitu akses informasi, pengaruh atau kekuasaan, dan klaim atau kewajiban untuk dukungan dari orang lain.

d. Modal fisik

Modal fisik adalah kategori aset penghidupan yang terdiri dari infrastruktur dan fisik barang dasar yang mendukung penghidupan berlangsung. Infrastruktur terdiri dari perubahan lingkungan fisik yang membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjadi lebih produktif. Komponen kunci dari infrastruktur termasuk pada sistem transportasi yang terjangkau, pasokan air dan sanitasi (kuantitas dan kualitas yang memadai), energi (yang baik bersih dan terjangkau), komunikasi yang baik dan akses mendapatkan informasi.

Penampungan (kualitas yang memadai dan daya tahan) dianggap oleh beberapa orang untuk menjadi infrastruktur. Sementara yang lain akan mempertimbangkan untuk menjadi aset fisik pribadi dan agak berbeda dari infrastruktur. Komponen lain dari modal fisik meliputi kapital produktif yang meningkatkan pendapatan (misalnya sepeda, becak, mesin jahit, dan peralatan pertanian), barang-barang rumah tangga dan peralatan dan barang-barang konsumsi pribadi seperti radio dan lemari es. Sebagian besar dimiliki oleh individu atau kelompok. Beberapa barang lainnya, seperti peralatan pertanian atau pengolahan unit yang lebih besar, dapat diakses melalui sewa atau dengan membayar biaya untuk jasa yang digunakan.



Penyeberangan fery merupakan salah satu usaha rakyat

e. Modal Pendanaan

Modal pendanaan adalah kategori aset penghidupan. Dalam kerangka PPL, modal pendanaan didefinisikan sebagai sumber daya keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan penghidupan mereka. Sumber daya ini bisa meliputi tabungan. Tabungan adalah jenis yang disukai sebagai modal finansial karena tidak memiliki kewajiban yang melekat dan biasanya tidak memerlukan ketergantungan pada orang lain. Hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu uang tunai, deposito bank atau aset cair seperti ternak dan perhiasan. Sumber keuangan juga bisa diperoleh melalui lembaga kredit-menyediakan yang kewajiban.

Arus masuk uang secara teratur, juga dikategorikan sebagai modal pendanaan. Dalam hal ini tidak termasuk pendapatan yang diperoleh. Jenis yang paling umum dari arus masuk ini adalah uang pensiun, atau transfer dari pihak lain (anak, saudara atau kerabat) dalam pengiriman uang. Dalam rangka untuk memberikan kontribusi positif untuk modal arus masuk ini harus dapat dipercaya (sedangkan reliabilitas lengkap tidak dapat dijamin ada perbedaan antara pembayaran satu kali dan transfer biasa atas dasar mana orang dapat merencanakan investasi).

Perlu dicatat bahwa definisi ini berbeda dari definisi ekonomi yang ketat dari modal karena termasuk arus serta saham. Kelima aset di atas, ditambah dengan aset keenam yaitu politik, menggambarkan bahwa ketahanan penghidupan dari rumah tangga atau kelompok masyarakat atau desa ditentukan keterkaitan satu sama lain. Apakah di dalam setiap aset terdapat masalah ataukah potensi atau sumber kekuatan yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai sebuah kesejahteraan.

Pengkajian Penghidupan Lestari adalah upaya memberikan informasi secara menyeluruh terkait fakta penghidupan dalam sebuah komunitas yang berusaha menemukan solusi alternatif penghidupan mereka. Ada lima aset yang utama, dalam pemenuhan pengembangan perencanaan desa berkelanjutan. Namun, kelima modal tersebut dapat dirumuskan menjadi tiga modal utama, yakni manusia, alam dan ekonomi. Pada dasarnya modal-modal tersebut selalu terkait satu sama lainnya, membentuk sistem yang seimbang dan berkelanjutan.

Modal tersebut diharapkan dapat dipakai untuk melakukan analisa dalam melakukan pembuatan rencana jangka panjang, menengah maupun rencana strategis jangka pendek untuk mewujudkan konsep *sustainable village*. Para pemangku kebijakan, warga masyarakat, perguruan tinggi, serta lembaga pendamping desa, dapat berupaya mendorong masyarakat untuk dapat menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang bergantung pada sumber daya mereka sebagai sumber penghidupan menuju konsep Desa Berkelanjutan.



Pembuatan Patung Sapundu

Peran Masyarakat dalam Membentuk Desa Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat (*community Development*), aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri, meski kemudian mereka mulai dapat berkembang ketika didampingi oleh fasilitator, praktisi pembangunan masyarakat dan para akademisi maupun oleh pemimpin masyarakat, serta para aktivis LSM termasuk profesional. Kerja-kerja pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan berbagai aspek dalam masyarakat tertentu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengertian yang lebih luas, pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberdayaan individu dan kelompok dari masyarakat yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dengan ketrampilan yang dimiliki sehingga terjadi perubahan pada kehidupan mereka. Ketrampilan ini sering diartikan sebagai pengembangan kemampuan secara politis yang tersusun dalam agenda kerja kelompok dalam cakupan yang besar. Dengan demikian pembangunan harus dimengerti sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh masyarakat itu sendiri.



Pembuatan Patung Sapundu

Proses pembangunan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial dan saling menghargai. Hal itu juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan di mana masyarakat yang belum mampu secara partisipatif melakukan penguatan dalam kehidupan mereka. Sedangkan dalam pembangunan tersebut, masyarakat difasilitasi oleh pekerja masyarakat. Dalam hal ini pekerja masyarakat akan memfasilitasi proses secara partisipatif sehingga masyarakat terdorong untuk mengembangkan kebijakan dan program-program pembangunan untuk mereka.

Dalam melakukan pembangunan masyarakat, dibutuhkan pengerak atau dalam istilah yang lebih lunak disebut dengan organisator masyarakat (*community organizer*). Para penggiat atau organisator di masyarakat dapat melakukan kegiatan yang terpadu dan

konstruktif. Maka dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat dibutuhkan seorang atau beberapa orang bahkan sebuah lembaga yang disebut dengan organisator masyarakat atau Fasilitator Masyarakat (*community facilitator*). Untuk mencapai sebuah perubahan sosial yang diinginkan maka untuk menjadi fasilitator masyarakat, seseorang atau kelompok orang atau lembaga paling tidak harus menguasai dan memahami:

1. Teori pembangunan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
2. Pengkajian kehidupan lestari (*sustainable livelihood assessment*)
3. Pengorganisasian masyarakat
4. Pendekatan dan prinsip-prinsip partisipasi dan menggunakan alat-alat penggalian data
5. Penyusunan strategi pembangunan masyarakat
6. Pemantauan dan evaluasi

Dengan demikian pembangunan masyarakat (*Community Development*) menggambarkan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, tanggung gugat, kesempatan yang sama dalam memilih, partisipasi, saling membutuhkan, saling memberi dan belajar yang berkelanjutan. Sedangkan pembelajaran, ketersediaan dan pemberdayaan merupakan prinsip dari pengembangan masyarakat.

Dengan demikian *community development* adalah sebuah perubahan yang direncanakan pada segala aspek kehidupan masyarakat (*economic, social, environmental and cultural*). Hal ini merupakan proses di mana anggota masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara bersama. *Community Development* merupakan sebuah pernyataan tujuan dari pembangunan masyarakat, dan atau cita-cita yang ingin dicapai melalui upaya bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. *Community development* dapat menjadi langkah awal dalam proses menuju pembentukan *sustainable village* (Desa Berkelanjutan).

Keterlibatan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna sumber daya tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam di sekitar desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Kerusakan sumberdaya alam dapat dihindari jika adanya perencanaan, pengelolaan dan sistem pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Proses pembangunan masyarakat akan dipadu dengan lima modal dari *Sustainable Livelihood Assesment* (SLA) atau Pengkajian Penghidupan Lestari (PPL). Hal itu, digunakan sebagai dasar menyusun visi dan misi kelompok usaha atau desa, yang dituangkan dalam sebuah rencana strategi desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menuju proses *sustainable village*.



BAB 3.

Profile Desa Sei Baru Tewu



Desa Sei Baru Tewu merupakan salah satu desa lokal masyarakat dayak di Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayahnya terletak di bagian barat dan timur Sungai Kahayan sehingga jenis tanah yang di desa juga ada dua jenis, yaitu tanah aluvial di bantaran sungai, dan tanah gambut di bagian barat dan timurnya. Keberadaan lahan gambut disamping memiliki fungsi ekologis juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologis yang diperankan lahan gambut diantaranya menjaga keanekaragaman hayati, penyimpan karbon, penghasil oksigen dan pengelolaan air. Sedangkan fungsi ekonomi dan sosial budaya dari lahan gambut diantaranya sebagai penghasil kayu dan sumber penghidupan masyarakat, serta tempat pendidikan dan penelitian.

Desa Sei Baru Tewu kaya akan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna yang membentuk ekosistem gambut di wilayah tersebut. Beberapa flora dan fauna yang masih dapat ditemui sampai saat ini



Pengerajin atap

diantaranya kera, babi hutan, beruang, kancil, rotan, purun, galam, rumbia, halaban, jelutung, dan humbut. Keanekaragaman hayati di ekosistem gambut ini juga mempunyai fungsi sosial ekonomi yang tinggi bagi masyarakat lokal desa. Pada mulanya masyarakat mengumpulkan hasil hutan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti sumber bahan pangan baik berupa tumbuhan dan hasil buruan serta bahan baku perumahan. Selanjutnya masyarakat menjual berbagai hasil hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut karena lahan gambut memiliki keanekaragaman hayati dengan nilai ekonomi tinggi seperti tumbuhan penghasil produk kayu dan non-kayu, penghasil ikan, jamur dan tanaman obat-obatan serta lebah hutan penghasil madu.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai beralih mata pencaharian ke bidang pertanian dan perkebunan sehingga hutan gambut sedikit demi sedikit dikonversi menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan ini dilakukan dengan cara membakar hutan karena relative mudah dengan biaya yang murah, serta dipercaya dapat menyuburkan tanah dan dapat

meningkatkan pH tanah. Selain itu perburuan, pembuatan kanal yang berlebihan, praktek *illegal logging* (penebangan liar) dan berkembangnya perusahaan perkebunan menambah daftar ancaman terhadap ekosistem gambut. Kondisi tersebut semakin parah dan mencapai puncaknya pada kebakaran hutan dan lahan yang hebat pada tahun 2015.

Pusat Pemerintahan Desa Sei Baru Tewu berada di RT 2, tepatnya di Jalan Betet No. 16. Jarak dari pusat Pemerintahan Desa ke Kecamatan sekitar 20 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 50 menit. Jarak ke Ibukota Kabupaten Pulang Pisau sekitar 15 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 30 menit. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah (Kota Palangkaraya) sejauh 115 Km dan bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor sekitar 2,5 jam. Untuk saat ini belum ada transportasi umum untuk menuju ibu kota kecamatan Maluku (berjarak 20 km atau 50 menit berkendara) dan kabupaten. Sedangkan untuk menuju ibu kota provinsi tersedia travel/taksi liar yang merupakan kendaraan pribadi yang dipakai untuk membawa penumpang.



Sumber: Citra Satelit Sei Baru Tewu, Googlemap (2020)

Sejarah Desa

Dahulu kala, sejumlah kelompok orang tinggal di sekitar bantaran sungai, seperti sungai Matih, Sungai Baru, Saka Duhung, Sungai Kanihin dan Sungai Awang. Mengingat tempat tinggalnya saling terpencar, maka oleh tetua kampung dikumpulkan. Mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk membuat tempat pemukiman secara mengelompok di tepi Sungai Kahayan, tepatnya di muara Sungai Baru. Karena mereka sadar dengan hidup berkelompok segala kesulitan hidup dapat diatasi bersama dan dimusyawahkan bersama. Atas dasar itulah, terbentuk sebuah perkampungan yang kemudian diberi nama Sungai Baru. Nama Sungai Baru itu sendiri diambil dari nama pohon kayu baru (waru) yang tumbuh berjejer di sepanjang sungai. Saat itu, ditunjuk sebagai Kepala kampung yang pertama bernama Bapak Dayan Nusa.

Sekitar tahun 1957 Bapak Asna (Bapak Banga) dan kawan-kawan membuka lahan baru di seberang Sungai Kahayan sebagai lahan untuk menanam padi sawah. Handel atau parit di kawasan lahan gambut dibangun secara gotong royong dengan menggunakan peralatan sederhana seperti selundak, cangkul, dan lain-lain

yang menghabiskan waktu berbulan-bulan. Kemudian parit besar tersebut diberi nama Sungai Tewu. Pasalnya, masyarakat menanam pohon tewu (tebu), disepanjang tanggul galian tersebut.

Lahan disepanjang Sungai Tewu ditata dan diolah menjadi areal persawahan yang subur dengan hasil panen yang memuaskan. Berita kesuburan tanah dan keberhasilan petani di Sungai Tewu tersebar sampai ke hulu dan hilir Sungai Kahayan. Hal ini mengundang kedatangan para penduduk dari wilayah lain seperti Bahaur, Pangkoh, Pulang Pisau, Kalawa, bahkan sampai dari Goha, Tewah (Kabupaten Gunung Mas). Mereka datang untuk ikut membuka lahan di kawasan tersebut. Sejak saat itu, kawasan bantaran Sungai Tewu semakin bertambah banyak orang yang bermukim dari berbagai daerah.

Pada tahun 1967 atas prakarsa Bapak Elok Pantap, Bapak Asna dan lainnya, mengusulkan pemekaran desa kepada pihak pemerintah. Atas berbagai pertimbangan, Pemerintah akhirnya mengabulkannya pada tahun 1968 dan diberi nama Kampung Sungai Tewu. Atas jasanya oleh tetua kampung diangkatlah Bapak Elok Pantap Ketua Kampung Sungai Tewu yang pertama. Sejak saat itu desa resmi dimekarkan menjadi dua desa. Sebelah barat Sungai Kahayan dinamakan Kampung Sungai Baru dipimpin oleh Bapak Dayan Nusa dan di wilayah timur Sungai Kahayan diberi nama kampung Sungai Tewu yang dipimpin oleh Bapak Elok Pantap.

Pada tahun 1980, dimasa kepemimpinan Kepala Desa, Bapak Kurdi S Rombang mengajak masyarakat untuk pindah membuat pemukiman baru di tepi Sungai Kahayan tepatnya di muara Sungai Tewu dengan maksud untuk memudahkan segala aktifitas baik transportasi maupun komunikasi ke luar daerah. Karena di dalam sungai aktifitas sangat tergantung pada kondisi alam, yaitu pasang surutnya air sungai. Namun kepindahan pemukiman tersebut selain ada dampak positifnya ada juga dampak negatifnya. Di satu sisi segala aktifitas masyarakat sudah agak membaik dibanding ketika bermukim di sungai dalam. Namun, dalam pertimbangan lainnya tidak semua masyarakat yang pindah dari sungai ke pemukiman baru yang disiapkan oleh Pemerintah Desa. Tetapi, sebagian pindah dan kembali ke kampung asal. Sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jumlah penduduk.

Pada perkembangannya tepatnya tahun 1995 terjadi penggabungan kedua wilayah tersebut menjadi satu pemerintahan dan diberi nama Desa Sei Baru Tewu yang diambil dari nama kedua desa tersebut. Dalam masa pemerintahan desa selanjutnya, ada beberapa kegiatan pembangunan yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat antara lain, pada tahun 2005 melalui program PKPS BBM-IP dibangun jalan penghubung Sei Tewu – Mintin sepanjang 2,5 Km. Sehingga segala aktifitas masyarakat Sei Tewu sejak saat itu sudah bisa melalui transportasi darat yang sebelumnya selalu mengandalkan transportasi air yaitu pakai perahu kayu (jukung dan klotok). Di tahun 2006 atas usul kelompok tani Hapakat Maju mendapat rehabilitasi tiga buah sungai sepanjang 12 Km yaitu Sungai Barania, Sungai Tewu dan Sungai Palahak. Namun semua sungai itu masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena pemilik lahan kebanyakan orang dari luar Desa Sei Baru Tewu.

BAB 4.

Potensi Desa



Berdasarkan pendataan awal tentang potensi Desa Sei Baru Tewu pada bulan September-November 2020 diadakan penggalian data yang melibatkan perwakilan masyarakat setempat. Hasil penggalian data diawali dengan pengisian data lima aset dalam SLA (*Sustainable Livelihood Approach*) yang berada di kawasan Desa Sei Baru Tewu, meliputi:

Modal Alam

Desa Sei Baru Tewu memiliki luas wilayah 3538,91 Ha yang terbagi ke dalam kawasan pemukiman, perkantoran, fasilitas umum, persawahan, perkebunan, dan perhutanan. Wilayahnya berbatasan dengan beberapa desa dan kecamatan, yaitu sebelah utara dan timur berbatasan dengan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kanamit, Purwodadi, Wonoagung, dan Kanamit Barat. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala. Wilayah desa yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sebangau Kuala merupakan kawasan hutan lindung.



Akses jalan desa

- **Topografi dan Jenis tanah**

Secara topografi Desa Sei Baru Tewu dilintasi jalur sungai besar, yaitu Sungai Kahayan. Bentang alam wilayah Desa Sei Baru Tewu merupakan dataran rendah *non littoral* dengan ketinggian kurang dari 10 Mdpl dan mempunyai sudut elevasi 8-15 serta dipengaruhi oleh pasang surut. Sehingga desa ini termasuk daerah yang mempunyai intensitas banjir yang cukup besar. Bagian tengah yang merupakan

daerah bantaran sungai adalah pusat pemukiman penduduk. Sedangkan wilayah barat dan timurnya didominasi oleh perkebunan dan hutan tropis dengan tipologi tanah gambut.

Geomorfologi dan jenis tanah di wilayah Desa Sei Baru Tewu juga mengikuti pola kondisi topografinya. Wilayah desa bagian timur dan barat didominasi lahan gambut yang memiliki ketebalan berkisar dari 0,5 – 3,5 meter. Gambut tersebut terbentuk dari vegetasi rawa yang sepenuhnya tergantung pada input unsur hara dari air hujan dan bukan dari tanah mineral di bawah atau dari rembesan air tanah, sehingga tanahnya menjadi miskin hara, bersifat masam dan sangat sukar untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian (Fikriyatul Falashifah, 2015).

Sedangkan jenis tanah di daerah bantaran Sungai Kahayan didominasi oleh tanah alluvial yang berasal dari endapan sungai. Tanah ini terbentuk akibat endapan dari berbagai bahan seperti aluvial dan koluvial yang juga berasal dari berbagai macam asal. Tanah ini memiliki struktur tanah yang tergolong tanah liat atau liat berpasir dengan kandungan pasir kurang dari 50%.



Tanaman cabai di pinggir sawah

- ***Iklm dan Cuaca***

Secara umum Desa Sei Baru Tewu termasuk daerah beriklim tropis dan lembab, dengan temperatur berkisar antara 26,5°C – 27,5°C dan suhu udara rata-rata maksimum mencapai 32° Celcius. Suhu udara rata-rata minimum 22,9°C. Kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata tahunan mencapai 80%.



Sebagai daerah beriklim tropis wilayah desa rata-rata mendapatkan penyinaran matahari di atas 50% dan merupakan wilayah dengan bulan basah terjadi antara 7-9 bulan (curah hujan > 20 mm/bulan) dan bulan kering (curah hujan < 100 mm/bulan) terjadi selama kurang dari lima bulan. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Oktober - Desember serta Januari – Maret yang berkisar antara 2000 – 3500 mm/tahun, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan Juni – September (Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, 2017).

Namun, beberapa tahun terakhir cuaca sulit diprediksi. Jadwal musim dan kejadian/aktifitas masyarakat selama satu tahun terakhir disajikan dalam table kalender musim hasil dari proses pemetaan partisipatif berikut ini:

Kalender Musim Desa Sei Baru Tewu

| NO | KEGIATAN/ KEJADIAN | BULAN | | | | | | | | | | | | PELUANG | MASALAH | |
|----|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGU | SEP | OKT | NOP | DES | | | |
| 1 | Musim | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Rawan Kebakaran | | | | | | | | | | | | | Sumur bor | Belum ada pemeliharaan | |
| 3 | Padi sawah | | | tanam | tanam | Tanam | | | Panen | panen | panen | | | Hasil produksi tinggi | Banyak hama | |
| 4 | Karet | | | sadap | sadap | Sadap | Sadap | sadap | Sadap | sadap | sadap | | | Umur panjang | Harga jual murah | |
| 5 | Sulur | panen | Panen | | | | | | | | | | panen | Cepat tumbuh | Hama babi | |
| 6 | Petai | | | panen | panen | | | | | | | | Panen | panen | Harga jual tinggi | Umur panen pendek |
| 7 | Rambutan | | Panen | panen | | | | | | | | panen | Panen | panen | Produksi tinggi | Kurang minat beli |
| 8 | Durian | | Panen | Panen | | | | | | | | | | | Harga jual tinggi | Bunga banyak gugur |
| 9 | Manggis | | | panen | | | | | | | | | | | Harga jual tinggi | Tidak panen tiap tahun |
| 10 | Cempedak | | Panen | panen | | | | | | | | | | | Harga jual tinggi | Kualitas rendah |
| 11 | Labu putih | | Panen | panen | | | | panen | Panen | panen | | | | | Mudah ditanam | Harga jual rendah |
| 12 | Padi gunung | | Panen | panen | | | | tanam | Tanam | tanam | | | | | Produksi banyak | Panen lama |
| 13 | Kembang kunyit | | | tanam | tanam | Tanam | | | Panen | panen | panen | | | | Harga tinggi | Hama ulat |
| 14 | Hama tikus | | | | | | | banyak | banyak | banyak | | | | - | | Sulit dibasmi |

Berdasarkan kalender musim tersebut dapat dilihat bahwa musim berpengaruh pada beberapa aktifitas masyarakat masyarakat. Diantaranya bulan rawan kebakaran pada musim kemarau akan mengganggu aktifitas dan produksi pertanian yang ada didesa tersebut. Begitu juga dengan aktifitas perkebunan, yang mengganggu aktifitas mulai dari tahap penyiapan lahan, penanaman, sampai panen. Kedua hal tersebut akan berdampak pada hasil bumi yang tidak produktif.

- **Keanekaragaman Hayati**

Keberadaan lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting baik dalam ruang lingkup lokal, regional, maupun global. Fungsi ekologis yang diperankan lahan gambut diantaranya menjaga keanekaragaman hayati, penyimpan karbon, penghasil oksigen dan pengelolaan air. Fungsi ekologis lahan gambut dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan dipengaruhi oleh karakteristik gambut itu sendiri yang merupakan ekosistem unik dengan pH asam, miskin hara, bahan organik yang tebal dan selalu terendam air. Hal tersebut yang menjadikan lahan gambut memiliki ciri khas di keanekaragaman hayati karena hanya mendukung keberadaan flora dan fauna tertentu yang mampu beradaptasi dengan kondisi habitat tersebut.

Jenis Keanekaragaman Hayati flora terus menurun dari tahun 2015 hingga sekarang ini akibat kebakaran hutan dan degradasi lahan. Kawasan yang ditumbuhi tanaman rotan, Purun, halaban, jelutung, meranti derta tanaman pakis turut menurun akibat kebakaran lahan dan hutan di tahun 2015.



Kebun Durian

Sedangkan Keanekaragaman fauna juga sangat menurun dratis sejak kebakaran lahan di tahun 2015. Beberapa hewan yang ditemui diantaranya adalah monyet ekor panjang, babi hutan, trenggiling, beruang, serta kancil dengan kondisinya terus menurun populasinya akibat diburu. Sedangkan jenis primata liar seperti lutung, bekantan, orang utan juga sangat rawan keberadaannya. Peralihan habitatnya terus terancam akibat kebakaran hutan dan degradasi lahan. Hewan liar lain seperti aneka jenis burung, serangga, dan reptil seperti buaya, biawak, serta ular juga masih ditemukan di sekitar desa. Sedangkan untuk keanekaragaman fauna lainnya masih dapat dijumpai kera ekor panjang, babi hutan, dan kancil. Keberadaan satwa liar di Sei Baru Tewu, secara umum mengalami penurunan akibat kebakaran lahan, perburuan, serta peralihan hutan menjadi kawasan perkebunan.



Kebun Jeruk

Sedangkan keanekaragaman hayati di sektor perkebunan atau buah-buahan tergolong banyak, seperti pertanian padi, perkebunan karet, kelapa sawit serta sengon dan sebagainya. Sedangkan keberadaan tanaman buah-buahan sangat variatif jenisnya seperti petai, durian, cempedak, rambutan, manggis, langsung, duku, kasturi dan sebagainya.

Di beberapa kawasan dijumpai pula beberapa tumbuhan alami yang hidup di ekosistem gambut seperti rotan, purun, galam, rumbia, halaban, dan jelutung. Pada umumnya, keberadaan terus berkurang berkurang pasca kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015. Walaupun demikian, beberapa jenis diantaranya telah ada peningkatan kembali.

Untuk kondisi vegetasinya, beberapa tanaman yang mampu bertahan hidup di lahan gambut walaupun bukan jenis tumbuhan yang spesifik di lahan gambut diantaranya karet, sawit, sengon, petai, durian, cempedak, rambutan, manggis, langsung, duku, dan rambai. Secara umum, tumbuhan-tumbuhan ini tidak terkena dampak kebakaran tahun 2015, bahkan ada yang muncul setelah kebakaran yaitu sawit dan sengon karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

- **Lahan Gambut**

Keberadaan lahan gambut memiliki peranan yang sangat penting baik dalam lingkup lokal, regional maupun global. Lahan gambut disamping memiliki fungsi ekologis juga memiliki fungsi ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologis yang diperankan lahan gambut diantaranya menjaga keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, penghasil oksigen dan pengelolaan air. Sedangkan fungsi ekonomi dan sosial budaya dari lahan gambut diantaranya sebagai penghasil kayu dan sumber penghidupan masyarakat, serta tempat pendidikan dan penelitian.



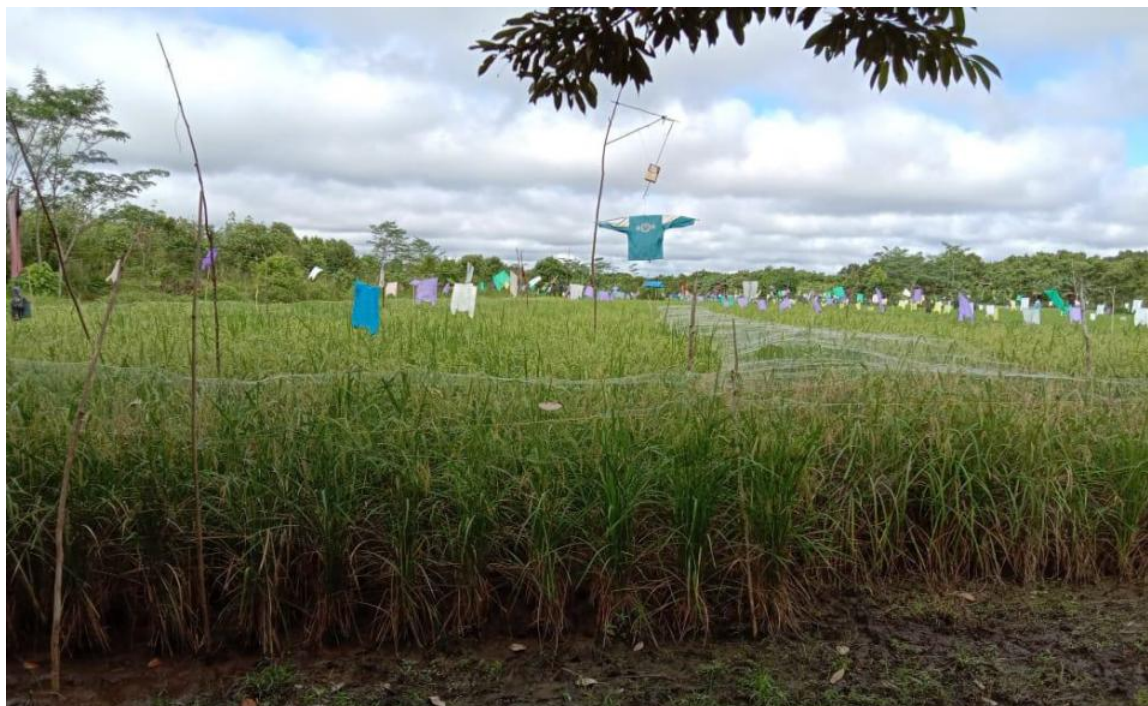
Buah Paken

Fungsi ekologis lahan gambut dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan lingkungan, dipengaruhi oleh karakteristik dari lahan gambut yang merupakan ekosistem unik dengan pH asam, miskin hara, bahan organik yang tebal dan selalu terendam air. Hal tersebut yang menjadikan lahan gambut memiliki kekhasan keanekaragaman hayati karena hanya mendukung keberadaan flora dan fauna tertentu yang mampu beradaptasi dengan kondisi habitat tersebut.

Pemerintah Indonesia berupaya memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan gambut yaitu diantaranya yang terbaru dengan menerbitkan PP No 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Setelah munculnya larangan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar masyarakat mulai malas berladang sehingga terjadi penurunan terhadap vegetasi padi. Dan muncul vegetasi-vegetasi baru seperti sawit dan sengon.

Keanekaragaman hayati di ekosistem gambut ini juga mempunyai fungsi sosial ekonomi yang tinggi bagi masyarakat lokal desa. Pada mulanya masyarakat mengumpulkan hasil hutan untuk berbagai keperluan sehari-hari seperti sumber bahan pangan baik berupa tumbuhan dan hasil buruan serta bahan baku perumahan. Selanjutnya masyarakat menjual berbagai hasil hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut karena lahan gambut memiliki keanekaragaman hayati dengan nilai ekonomi tinggi seperti tumbuhan penghasil produk kayu dan non kayu, penghasil ikan, jamur dan tanaman obat-obatan serta lebah hutan penghasil madu.

Pada umumnya lahan gambut yang ada di Desa Sei Baru Tewu merupakan milik perorangan dengan jumlah total luas lahan gambut yang dikuasai secara individual adalah sekitar kurang lebih 300 Ha. Selain itu juga ada lahan yang dikuasai secara komunal yang merupakan tanah kas desa sekitar kurang lebih 1,7 Ha berupa tanah kosong. Sedangkan pola penguasaan handel dan parit, dari 12 handel dan 27 parit yang terdapat di wilayah desa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar khususnya yang mempunyai lahan di sekitarnya untuk keperluan pertanian dan perkebunan.



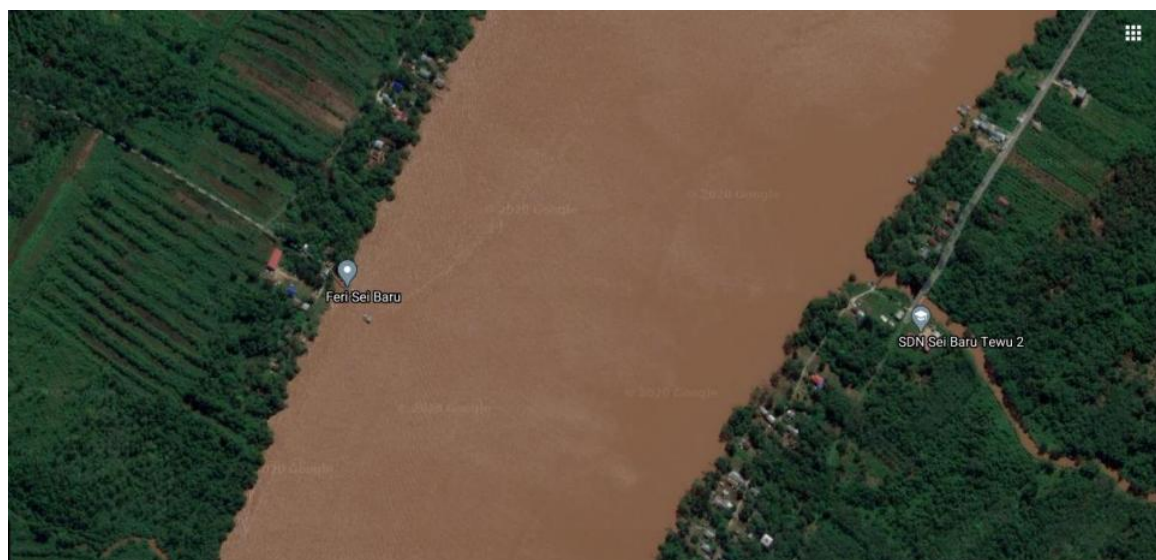
- **Pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Alam**

Secara umum pola pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di Desa Sei Baru Tewu terbagi ke dalam beberapa jenis penggunaan lahan, yaitu pemukiman, hutan, sawah, dan perkebunan (karet, sawit, jabon, sengon). Berdasarkan karakter atau jenis tanah yang ada di Desa Sei Baru Tewu dapat dimanfaatkan untuk bertani dan berkebun. Pemanfaatan tanah dengan jenis tanaman pangan dapat dilakukan seperti: padi, ubi jalar, dan singkong/ubi kayu. Selanjutnya untuk sayuran juga dapat tumbuh di Desa Sei Baru Tewu meskipun untuk sayuran ini porsi lahan hanya sedikit. Untuk hasil lahan hutan yang biasanya dapat dimanfaatkan adalah rotan, dan untuk lahan perkebunan yang dapat dilakukan warga adalah penanaman karet. Sedangkan luasan tata guna wilayah desa dapat dilihat dari tabel berikut ini:

| Luas Tata Guna Lahan | |
|--------------------------------|------------------|
| Jenis Tanah | Luas (Ha) |
| Sawah tadah hujan | 359,60 |
| Pemukiman | 521,54 |
| Tegal/ladang | 7,00 |
| Lahan Gambut | 300,00 |
| Tanah Perkebunan Rakyat | 939,48 |
| Perkantoran pemerintah | 0,0106 |
| Bangunan sekolah | 0,04 |
| Jalan | 7,86 |
| Pemukaman Umum | 0,25 |
| Jenis Hutan asli/lahan resapan | 270,00 |

- **Penguasaan Tanah dan Sumber Daya Alam**

Pemukiman masyarakat desa Sei Baru Tewu terbagi menjadi dua wilayah yaitu di wilayah Sei Tewu (di sebelah timur sungai Kahayan) dan di wilayah Sei Baru (sebelah barat sungai Kahayan). Selain itu juga ada sebagian pemukiman di sepanjang aliran sungai Kahayan. Bagi masyarakat desa sungai, tanah, dan hutan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan hal itu telah berkembang pola penguasaan dan kepemilikan lahan.



Secara turun temurun masyarakat desa menguasai lahan di sekitar nya untuk mengumpulkan hasil hutan dan bercocok tanam. Penguasaan dan pemanfaatan lahan ini dapat bersifat perorangan dan bersifat komunal. Pemukiman masyarakat desa tersebut terbagi menjadi dua wilayah yaitu di wilayah Sei Tewu (di sebelah timur Sungai Kahayan) dan di wilayah Sei Baru (sebelah barat Sungai Kahayan). Selain itu juga ada sebagian pemukiman di sepanjang aliran sungai Kahayan.

Modal Manusia

- **Penduduk**

Jumlah penduduk Desa Sei Baru Tewu saat ini mencapai 707 jiwa. Bila dilihat dari rasio jenis kelamin, Desa Sei Baru Tewu memiliki komposisi dengan jumlah laki-laki 369 jiwa dan perempuan 338 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Desa tersebut adalah 157 dengan status Warga Negara Indonesia.

Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) 406 orang. Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja 15 orang. Sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga 100 orang. Selain itu, penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh 190 orang. Sedangkan laju Pertumbuhan penduduk Desa Sei Baru Tewu dalam tiga tahun terakhir ini dapat dilihat dari diagram berikut:

Jumlah penduduk 3 tahun terakhir

| Jenis Kelamin | 2015 | 2016 | 2017 | Prosentase Perkembangan |
|---------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| Laki-laki | 332 | 350 | 369 | 5,426 % |
| Perempuan | 325 | 300 | 338 | 10,146 % |
| Total | 657 | 650 | 707 | 7,786 % |

Sumber Data : Profil Desa 2016, Prodeskel 2017

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan data jumlah penduduk Desa Sei Baru Tewu saat ini mencapai 707 jiwa. Dilihat dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Desa Sei Baru Tewu mengalami peningkatan dari tahun ketahunnya rata-rata sekitar 7,786%.

Sedangkan kepadatan penduduk di Kecamatan Maluku tahun 2016 mencapai 57 jiwa/km². Dari angka tersebut disimpulkan kepadatan penduduk Desa Sei Baru Tewu bisa tergolong tidak padat yakni pada setiap 1 Km² hanya didiami kurang lebih 11 - 12 orang saja.



- **Tenaga Pendidikan dan Kesehatan**

Jumlah Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kesehatan dapat dilihat dari table di bawah ini:

Jumlah Tenaga Pendidikan

- Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak 25 orang
- Jumlah guru SD dan sederajat 18 orang
- Jumlah siswa SD dan sederajat 70 orang

Sumber Data: Profil Desa 2016, Prodeskel 2017

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas SDM. Gambaran umum keadaan pendidikan di Sei Baru Tewu antara lain tercermin dari jumlah prasarana pendidikan (sekolah), murid dan guru. Angka Partisipasi Murni pada tahun 2018 Sekolah Dasar mencapai 100 %, Sekolah Menengah Pertama 100 % dan Sekolah Menengah Atas 90%. Dari data tersebut dapat dilihat angka partisipasi pendidikan masih ada sekitar 11% penduduk berusia 16 – 18 tahun tidak bersekolah.

Sedangkan untuk jumlah tenaga kesehatan hanya ada 4 orang bidan, dan ada 9 kader posyandu serta tanpa dokter. Dalam realitasnya kebutuhan tenaga dokter yang profesional sangat dibutuhkan. Tetapi pada umumnya tenaga kesehatan yang ada di desa sudah paham terhadap pengetahuan dan kemampuan pertolongan pertama pada kebakaran dan asap.

Modal Fisik

- **Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial**

Untuk mengetahui jenis dan jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Desa Sei Baru Tewu disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Fasilitas Umum, meliputi:

- Pelabuhan/dermaga sungai 1 unit
- Jembatan 13 unit
- Jalan Provinsi sejauh 2,5 Km
- Jalan Kabupaten sejauh 2,5 Km
- Jalan Desa sejauh 2200 m
- Gang sejauh 2,5 Km

Fasilitas Sosial, meliputi:

- Kantor Desa 1 unit
- Balai Desa 1 unit
- Gedung TK/PAUD 1 unit
- Gedung SD 2 unit
- Gereja 2 unit
- Masjid 1 unit
- Mushola 1 unit
- Posyandu 1 unit
- Pustu 1 unit
- Perumahan Guru 3 unit



Dermaga Sei Baru Tewu di tepi Sungai Kahayan

Secara umum sarana dan prasarana desa sudah cukup memadai walaupun perlu adanya peningkatan seperti infrastruktur jalan dan jembatan. Jalan lintas provinsi lebarnya kurang lebih 4 meter yang menghubungkan Desa Sei Baru Tewu dengan Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir. Bahkan kondisi lebih parahnya terdapat di Desa Kanamit, jalan berlubang di beberapa bagian ruasnya sehingga meningkatkan resiko kecelakaan saat musim hujan. Sedangkan kondisi jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah Desa Sei Baru Tewu dengan Desa Mintin keadaannya rusak. Lalu lebar jalan yang hanya sekitar 2 meter akan berfungsi lebih baik jika dilakukan pelebaran, mengingat mobilitas masyarakat yang dinamis karena merupakan akses ke Ibu kota kabupaten dan sebaliknya.



Jalan desa

- **Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan**

Fasilitas pendidikan di Desa Sei Baru Tewu cukup memadai dengan adanya 2 Sekolah Dasar, yaitu SDN Sei Baru Tewu 1 dan SDN Sei Baru Tewu 2. Selain itu juga ada gedung PAUD yang baru dibangun tahun 2017 oleh Pemdes dengan kondisi bangunan masih sangat baik.

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan di desa ini tersedia puskesmas pembantu dan gedung posyandu. Walaupun gedung pustu ada sedikit kerusakan namun ketersediaan peralatan kesehatan serta tenaga kesehatannya cukup memadai untuk memeriksa ataupun merawat korban kabut asap. Selain itu ada gedung posyandu kondisinya masih sangat baik dengan ruangan yang cukup luas sehingga memadai jika digunakan untuk posko gambut.



Modal Sosial

- **Etnis, Bahasa dan Agama**

Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, dll. Keragaman budaya atau “*cultural diversity*” adalah entitas yang sangat mendukung kemajuan bangsa Indonesia, akan tetapi juga dapat pula sebagai kunci perpecahan. Desa Sei Baru Tewu merupakan desa lokal masyarakat dayak sehingga mayoritas penduduk desa ini beretnis dayak (90%). Namun seiring berjalannya waktu dinamika penduduk seperti perkawinan atau perpindahan penduduk menambah etnis lain juga ada di desa seperti suku Banjar (5%), Jawa (5%). Sedangkan mengenai kepercayaan, mayoritas penduduk beragama Islam (60%) dan sisanya beragama Kristen (40%).

- **Seni Budaya Tradisional**

Meskipun tidak ada sanggar khusus ataupun kelompok kesenian, masyarakat Desa Sei Baru Tewu masih mengenal ataupun menampilkan pertunjukan kesenian lokal saat ada acara-acara tertentu. Beberapa kesenian yang masih ditampilkan adalah:

1. Tari Manasai Pengantinaan

Manasai merupakan salah satu jenis tari pergaulan dan melambangkan kegembiraan. Tarian ini dilakukan oleh beberapa orang penari pria dan wanita. Para penari berdiri berselang-seling antara pria dan wanita dalam satu lingkaran. Tari ini biasanya juga diadakan untuk menyambut tamu-tamu istimewa atau biasa disebut juga dengan tarian selamat datang.

2. Karungut Pengantinan

Kesenian Karungut sangat dikenal oleh suku dayak Kalteng. Di sepanjang jalur sungai Kahayan, Katingan, Rungan Manuhing, Barito dan Kapuas, Karungut dikenal populer oleh masyarakat sekitar. Popularitas Karungut di sepanjang jalur sungai tersebut karena Karungut tidak lagi hanya sebatas ditampilkan dalam sebuah ritual melainkan sudah mudah ditemui pada berbagai macam acara hajatan seperti perkawinan, khitanan, penyambutan tamu penting, bahkan dalam acara kampanye. Seni Karungut kemudian menjadi turun temurun karena para ibu



Patung Sapundu biasanya dipasang di makam orang dayak beragama Kaharingan. untuk mengenang almarhum

menyanyikan dan melantungkannya ketika menidurkan putra dan putrinya, sehingga sejak masa kecil masyarakat Kalteng telah terbiasa mendengarkan Karungut.

3. Tari Mandau

Tari Mandau dalam pertunjukannya diiringi dengan alunan suara yang merdu dan menghentak, Tari Mandau biasanya tidak hanya di lakukan penari pria saja tetapi wanita juga melakukannya. Dalam perkembangannya Tari Mandau ini sering dilakukan di acara adat, upacara penyambutan, festival budaya dan lain-lain.

• **Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Sebagai desa lokal masyarakat dayak, ada adat istiadat yang masih dilakukan masyarakat sampai saat ini khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, yaitu:

1. Manyanggar

Ritual ini merupakan tradisi dalam lingkungan masyarakat dayak karena mereka percaya bahwa dalam kehidupan dunia, selain manusia juga hidup makhluk halus. Perlunya membuat rambu-rambu atau tapal batas dengan roh halus tersebut diharapkan agar keduanya tidak saling mengganggu alam kehidupan masing-masing serta sebagai ungkapan



penghormatan terhadap batasan kehidupan makhluk lain. Ritual manyanggar biasanya digelar saat masyarakat akan membuka lahan baru untuk pertanian, mendirikan bangunan untuk tempat tinggal atau sebelum dilaksanakannya kegiatan masyarakat dalam skala besar. Melalui upacara ini, apabila lokasi yang akan digunakan oleh manusia dihuni oleh makhluk halus (gaib) supaya bisa berpindah ke tempat lain secara damai sehingga tidak mengganggu manusia lainnya.

2. Tajahan

Tajahan adalah suatu tempat yang dikeramatkan oleh suku dayak. Lokasi tajahan pada umumnya berada di kawasan rimba belantara yang masih lebat dan terkesan angker. Di kawasan tersebut ada larangan untuk melakukan berbagai aktifitas manusia seperti menebang pohon, memungut hasil hutan, berburu dan aktifitas lainnya. Konsep ini sangat relevan dengan konsep konservasi dan restorasi gambut.

3. Manugal

Manugal merupakan menanam padi yang dilakukan secara *handep* (bersama-sama) atau gotong royong oleh masyarakat desa. Hal tersebut dilakukan pada saat musim tanam.

- **Organisasi Sosial Formal**

Organisasi sosial formal, pada dasarnya merupakan organisasi yang sengaja dibentuk oleh pemerintahan dan merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah pusat. Keberadaan organisasi tersebut, biasanya dilengkapi dengan susunan kepengurusan berikut peraturan yang mengikat anggota/individu yang terlibat di dalamnya. Di Desa Sei Baru Tewu ada beberapa lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat antara lain adalah: BPD, Karang Taruna, Kelompok, BUM Desa, PKK, Kelompok Perempuan, Posyandu, Gapoktan dan Mantir Adat.

- **Organisasi Sosial Nonformal**

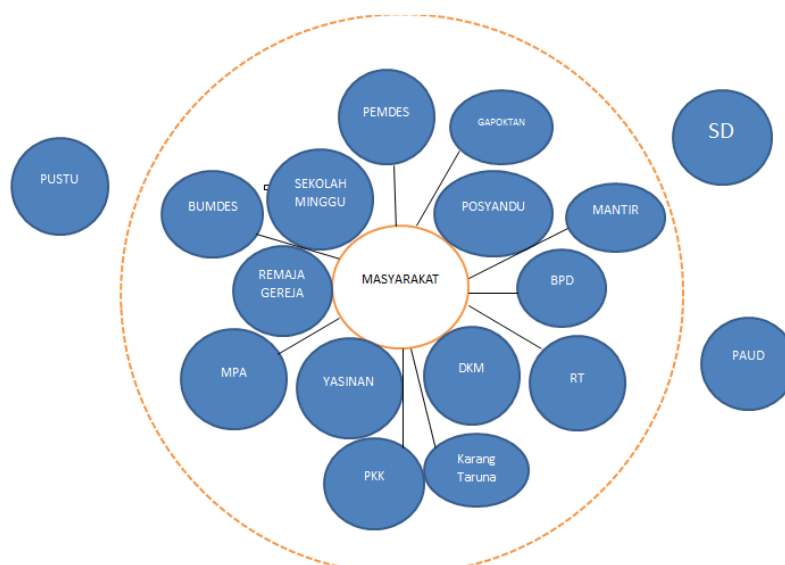
Berbeda dengan organisasi formal, organisasi yang bersifat informal terdapat kecenderungan lahir karena mempunyai kepentingan yang sama, terkadang hanya bersifat insidental. Dalam tipe ini, tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya susunan kepengurusan dan peraturan yang mengikat. Beberapa contoh dari organisasi informal: kelompok arisan, kelompok pengajian. Adapula organisasi sosial non formal dalam bidang keagamaan seperti komunitas Yasinan, Rukun Kematian, Sekolah Minggu serta DKM atau Dewan Kehormatan Masjid.

- **Jejaring Sosial Desa**

Jaringan sosial (*social network*) di pedesaan menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) yang menjadi penopang keberadaan masyarakat pedesaan. Jaringan sosial ini terbangun melalui hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan yang bersifat formal maupun informal. Setiap warga dari suatu masyarakat di pedesaan dipastikan secara alamiah akan melakukan hubungan-hubungan sosial yang kongkrit hingga terbentuk suatu kelompok sosial, baik berdasarkan ikatan atas dasar kepentingan ekonomi, politik maupun budaya/kepercayaan.

Mengapa hal tersebut penting? Karena dengan menggunakan pendekatan tersebut akan mampu untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat desa, seperti: terbatasnya peluang kerja, struktur sumber daya ekonomi yang kurang beragam, keterbatasan pendidikan, keterampilan, peralatan dan modal. Sejumlah keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas sejatinya dengan pembentukan dan pemanfaatan jaringan sosial merupakan strategi adaptasi yang paling efektif dan utama.

Diagram Venn



Modal Dana

• **Sumber Pendapatan Desa**

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten, serta pendapatan lain-lain yang terdiri dari hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Sebagai contoh Pendapatan Desa yang sah serta asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 1.090.925.000,- (Satu Miliar Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), yang bersumber dari: hasil usaha desa, dana desa, hasil pajak dan retribusi kabupaten, alokasi dana desa serta bantuan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten.



Tanaman kacang panjang di pinggir sawah

• **Pengelolaan Pendapatan Desa**

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan:
 - Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa.
 - Operasional pemerintah desa.
 - Operasional BPD.
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif RT/RW.

- **Aset Desa**

Dalam UU no.6 tahun 2014 pasal 77 disebutkan tentang bagaimana pengelolaan aset pada desa. Regulasi tersebut menyebutkan beberapa ketentuan yang termuat, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan desa.
3. Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dibahas oleh kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam peraturan Pemerintah. Pada ayat ke-3 disebutkan bahwa ada Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait aset desa.

Peraturan Pemerintah ini adalah Permendagri no. 1 tahun 2016 tentang “Pengelolaan Aset Desa”. Dimana aset desa dibagi ke dalam beberapa bidang, yaitu: Aset tanah kosong (1,7 ha), fasilitas umum (0,3 ha) berupa lapangan olahraga. Sedangkan aset peralatan dan mesin berupa satu unit mesin pemadam/pompa. Aset Bangunan dan Gedung milik desa adalah gedung Posyandu, PAUD serta kantor Balai Desa.

- **Tingkat Pendapatan Warga**

Sebagian besar masyarakat Desa Sei Baru Tewu memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan perkebunan. Komoditas utama adalah karet dan padi. Menurut hasil wawancara yang dilakukan terhadap warga, pendapatan masyarakat di bidang pertanian dan perkebunan berkisar antara Rp. 800.000,- hingga Rp. 2.000.000,- per bulan.

Jenis mata pencaharian warga di sektor pertanian serta perkebunan meliputi petani, pekebun karet, pekebun sawit, penambak ikan dan penanam sengon. Sedangkan tenaga kerja di luar sektor pertanian diantaranya sebagai penyedia jasa angkutan sungai, pembuat kerajinan rotan, profesi dibidang kesehatan (Bidan) serta guru.

- **Potensi Pengelolaan Lahan Gambut**

Potensi wilayah adalah keseluruhan kekuatan yang meliputi sumber daya alam dan manusiawi, baik yang sudah terwujud maupun yang belum, dan dapat dimanfaatkan bagi perkembangan dan kelangsungan wilayah tersebut. Sumber daya alam suatu wilayah adalah merupakan semua bahan atau material yang terdapat dan dimiliki oleh suatu daerah secara alami. Artinya, sumber daya tersebut telah disediakan oleh alam yang timbul sebagai akibat proses alamiah dan berguna bagi kehidupan umat manusia. Sifat penyebaran sumber daya alam secara geografis tidak merata, dimana antara satu wilayah dengan wilayah lain memiliki sumber daya alam yang berbeda. Sei Baru Tewu merupakan salah satu desa yang kaya akan potensi sumberdaya alam. Dari sektor pertanian, produktivitas padi mencapai 4,02 Ton/Ha, sedangkan hasil panen ubi jalar tercatat sebanyak 1,07 Ton/Ha.

Tabel Luas Lahan dan Jumlah Produksi

| Nama Komoditi / Produk | Luas Lahan | Jumlah Produksi |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| <i>Sektor Pertanian</i> | | |
| Padi sawah | 301 Ha | 4,02 Ton/Ha |
| Padi ladang | 5 Ha | 0,27 Ton/Ha |
| Ubi jalar | 1 Ha | 1,07 Ton/Ha |
| Tomat | 1 Ha | 1 Ton/Ha |
| Mentimun | 1 Ha | 2 Ton/Ha |
| Terong | 1 Ha | 1 Ton/Ha |
| Kangkung | 1 Ha | 1,05 Ton/Ha |
| Kacang panjang | 2 Ha | 3 Ton/Ha |
| Jeruk nipis | 1 Ha | 1 Ton/Ha |
| Ubi kayu | 10 Ha | 2 Ton/Ha |
| <i>Sektor Kehutanan</i> | | |
| Galam | 10 Ha | 5000 batang |
| <i>Perkebunan</i> | | |
| Kelapa sawit | 25 Ha | 0,05 Ton/Ha |
| Karet | 100 Ha | (tidak diketahui) |

BAB 5.

Strategi dan Peran serta Masyarakat



Peranan Pembangunan Masyarakat dalam Membentuk Desa Berkelanjutan

Pembangunan masyarakat (*community Development*), aktor utamanya adalah masyarakat itu sendiri, meski kemudian mereka mulai dapat berkembang ketika didampingi oleh fasilitator, praktisi pembangunan masyarakat dan para akademisi maupun oleh pemimpin masyarakat, serta para aktivis LSM termasuk profesional. Kerja-kerja pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan berbagai aspek dalam masyarakat tertentu dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengertian yang lebih luas, pembangunan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberdayaan individu dan kelompok dari masyarakat yang dilakukan oleh kelompok itu sendiri dengan ketrampilan yang dimiliki sehingga terjadi perubahan pada kehidupan mereka. Ketrampilan ini sering diartikan sebagai pengembangan kemampuan secara politis yang tersusun dalam agenda kerja kelompok dalam cakupan yang besar. Dengan demikian pembangunan harus dimengerti sebagai kegiatan yang dilakukan baik oleh individu maupun oleh masyarakat itu sendiri.

Proses pembangunan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan berdasarkan keadilan sosial dan saling menghargai. Hal itu juga dipengaruhi oleh struktur kekuasaan di mana masyarakat yang belum mampu secara partisipatif melakukan penguatan dalam kehidupan mereka.

Sedang dalam pembangunan tersebut, masyarakat difasilitasi oleh pekerja masyarakat. Dalam hal ini pekerja masyarakat akan memfasilitasi proses secara partisipasi sehingga masyarakat terdorong untuk mengembangkan kebijakan dan program-program pembangunan untuk mereka.

Dalam melakukan pembangunan masyarakat, dibutuhkan penggerak atau dalam istilah yang lebih lunak disebut dengan organisator masyarakat (*community organizer*). Para penggiat atau organisator di masyarakat dapat melakukan kegiatan yang terpadu dan konstruktif. Maka dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat dibutuhkan seorang atau beberapa orang bahkan sebuah lembaga yang disebut dengan organisator masyarakat atau Fasilitator Masyarakat (*community facilitator*). Untuk mencapai sebuah



Penjual sayur keliling

perubahan sosial yang diinginkan maka untuk menjadi fasilitator masyarakat, seseorang atau kelompok orang atau lembaga paling tidak harus menguasai dan memahami:

1. Teori pembangunan masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan
2. Pengkajian penghidupan lestari (*sustainable livelihood assessment*)
3. Pengorganisasian masyarakat
4. Pendekatan dan prinsip-prinsip partisipasi dan menggunakan alat-alat penggalian data
5. Penyusunan strategi pembangunan masyarakat
6. Pemantauan dan evaluasi

Dengan demikian pembangunan masyarakat (*Community Development*) menggambarkan nilai-nilai keterbukaan, kesetaraan, tanggung gugat, kesempatan yang sama dalam memilih, partisipasi, saling membutuhkan, saling memberi dan belajar yang berkelanjutan. Sedangkan pembelajaran, ketersediaan dan pembedayaan merupakan prinsip dari pengembangan masyarakat.

Dengan demikian *community development* adalah sebuah perubahan yang direncanakan pada segala aspek kehidupan masyarakat (*economic, social, environmental and cultural*). Hal ini merupakan proses di mana anggota masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah yang mereka hadapi secara bersama. *Community Development* merupakan sebuah pernyataan tujuan dari pembangunan masyarakat, dan atau cita-cita yang ingin dicapai melalui upaya bersama untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. *Community development* dapat menjadi langkah awal dalam proses menuju pembentukan *sustainable village* (Desa Berkelanjutan).

Keterlibatan masyarakat sebagai pemilik dan pengguna sumber daya tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya alam di sekitar desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Kerusakan sumberdaya alam dapat dihindari jika adanya perencanaan, pengelolaan dan sistem pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Proses pembangunan masyarakat akan dipadu dengan lima modal dari *Sustainable Livelihood Assesment* (SLA) atau Pengkajian Penghidupan Lestari (PPL). Hal itu, digunakan sebagai dasar menyusun visi dan misi kelompok usaha atau desa, yang dituangkan dalam sebuah rencana strategi desa atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) menuju proses *sustainable village*.

Tantangan dan Strategi Desa Mandiri

Konsep pembangunan desa ala Orde Baru, strategi pembangunan desa dilakukan dengan memadukan berbagai sektor ke dalam pembangunan desa terpadu, yang berupaya membuat semacam standarisasi tatanan kehidupan desa. Implementasi strategi pembangunan desa ini secara signifikan telah membawa perubahan, terutama dalam mobilitas fisik dan sosial orang desa. Tetapi konsep pembangunan desa semacam ini jelas-jelas tidak bermuara pada transformasi sosial desa. Mengapa tidak membawa transformasi desa? Karena dalam strategi pembangunan desa tersebut, Orde Baru justru tidak memperkuat institusi desa dan otonomi desa, melainkan justru melemahkan, meminggirkan dan bahkan menghancurkan otonomi desa. Eksperimentasi pembangunan desa dengan model yang sama juga masih muncul secara jamak di era reformasi. Pemerintah pusat, melalui Kementerian/Lembaga ramai-ramai membuat program di desa yang identik dengan sebutan program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Program-program yang masuk ke desa tersebut bersifat fragmented tidak hanya dalam kerangka acuan kerjanya tapi sumberpendanaannya. Sekali lagi, dalam konteks ini, desa hanya sekadar sebagai lokasi bukan



arena bagi keikutsertaan sumber daya dan kelembagaan lokal dalam pembangunan. Masing-masing program memiliki *court of conduct*, aturan main dan pelembagaan project berbeda, tapi bermuara pada fokus yang sama yaitu desa sebagai lokasi. Akibatnya, skema pengelolaan programnya bersifat intervensionis. Skema program mengemudikan model pemenuhan kebutuhan prioritas hidup masyarakat, jawaban atas peta persoalan lokal hingga pilihan pengelolaan sumber daya lokal. Secara skematik, posisi program-program seperti ini berada di luar sistem desa, namun memiliki pengaruh intervensionis yang kuat. Tambahan pula, program-program dengan skema BLM tidak mampu menyediakan jawaban yang memadai atas kebutuhan desa seperti menguatnya kapasitas pemerintahan desa, menguatnya partisipasi, emansipasi warga maupun organisasi warga desa, serta kemandirian pengelolaan keuangan desa.

Di satu sisi, menguatnya model “desa membangun” dimana inovasi, partisipasi hingga emansipasi transformasi social tumbuh dari bawah dan dalam desa (*endogenous*) adalah bagian dari ketidakberhasilan model pembangunan yang dikemudikan dari luar desa (*exogenous*). Tapi pada sisi yang lain, pembangunan desa yang tumbuh dari dalam menjadi pilar penting pembangunan nasional yang harus direkognisi oleh negara. Bahkan dengan negara merekognisi prakarsa dan emansipasi lokal akan menyatukan seluruh entitas Negara bangsa dalam satu konsep dan implementasi pembangunan nasional menuju kemandirian nasional. Jadi, kemandirian negara Indonesia sejatinya terletak pada kemandirian desa-desanya sebagai entitas penyusun dan penyanggana besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa akan diberlakukan berbeda dari sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat subnasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa juga tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah. Desa juga mendapat rekognisi dan subsidiaritas kewenangan yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Di samping itu desa akan menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skop dua kewenangan tadi.

Akhir-akhir ini di awal-awal tahun implementasi UU Desa, ada beberapa kalangan tertentu menghawatirkan pelaksanaan UU Desa tidak berhasil. Kekhawatiran mereka rata-rata berpangkal pada persoalan transfer keuangan yang nantinya akan dikelola desa. Meski belum menyajikan bukti, mereka sudah menyangka desa akan menjadi sarangnya koruptor anggaran publik. Akar masalahnya, menurut para pengkritik tersebut ada pada kapasitas pemerintah desa yang masih lemah. Prasangka ini, di satu sisi memang harus diterima sebagai cermin kewaspadaan dan pelecuc motivasi.



Perkebunan kayu sengon

Di sisi yang lain, kita semua tentu harus bercermin dan mengambil pembelajaran berharga dari model-model pembangunan desa di masa lalu yang rata-rata tidak responsif pada upaya-upaya penguatan dan pemberdayaan kapasitas desa. Nah, pada akhirnya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah bagian dari ikhtiar mencapai keberdayaan negara bangsa Indonesia dari kemandirian desa-desanya. Lalu, bagaimana mewujudkan kemandirian desa?

Berkait dengan pertanyaan ini, sesungguhnya telah banyak desa-desa yang sudah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa. Tak terkecuali desa para pembaca yang budiman. Silakan dicermati desa kita, pasti ada pertikan-pertikan inovasi lokal yang itu menunjukkan keberdayaan dan kemandirian desa. Belajar pada berbagai praktik inovatif dan emansipatif yang tumbuh dari dalam desa-desa diberbagai belahan negeri Indonesia, dapat ditarik beberapa strategi yang semoga layak diterapkan. Ada beberapa strategi yang

secara umum dipraktikkan dalam membangun kemandirian desa dari dalam yaitu:

1. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kriti dan dinamis.

Proses pembentukan bangunan warga dan organisasi masyarakat sipil biasanya dipengaruhi oleh factor eksternal yang mengancam hak publik. Meski demikian, keduanya adalah modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsive masyarakat. Di desa sebenarnya sudah banyak lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Kelembagaan tersebut secara umum terbagi dalam dua jenis, lembaga korporatis dan non korporatis. Lembaga korporatis identik dengan organisasi masyarakat desa yang dibentuk oleh negara. Contohnya, PKK, Karang Taruna, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip) dan kelompok tani, kelompok nelayan, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang akhir-akhir ini menjamur seiring masuknya program masuk desa dari Kementerian/Lembaga (K/L). Sementara, yang non korporatis adalah organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat. Contohnya, majelis taklim (kelompok pengajian yasin tahlil), *rambange* (semacam perkumpulan petani pengguna air untuk cocok tanam di Kabupaten Gowa), organisasi adat dan kelompok seni rakyat.

2. Melakukan *assessment* dan pemetaan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa.

Tujuannya apa? *Pertama*, agar pemerintah desa mempunyai data ada berapa, mana dan siapa saja sih organisasi kemasyarakatan desa yang masih aktif dan pasif. Kita mungkin akan bersepakat, bahwa tidak sedikit organisasi kemasyarakatan desa yang masih ada struktur organisasinya tapi

sudah tidak ada lagi pengurusnya. Masih ada pengurusnya, ternyata tidak memiliki program dan kegiatan yang jelas. Karena itulah *kedua*, dengan pemetaan ini diharapkan desa akan memiliki *baseline* data tentang apa saja masalah dan potensi yang organisasi kemasyarakatan desa sehingga memungkinkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjalankan mandat pembangunan.

3. Mengorganisasi dan memfasilitasi proses penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa melalui penyelenggaraan program/kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas organisasi tersebut.

Hasil pemetaan tersebut sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah desa untuk membuat seperangkat strategi kebijakan dan program desa untuk menguatkan peran organisasi kemasyarakatan desa dalam kerangka pembangunan desa. Caranya bagaimana? Tidak lain pemerintah desa harus mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi/ peremajaan pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.

Tidak lain pemerintah desa harus mengakomodasi program/kegiatan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan desa ke dalam dokumen peraturan desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Bentuk kegiatan untuk penguatan kapasitas misalnya pelatihan manajemen organisasi, mendorong restrukturisasi/ peremajaan pengurus organisasi, ataupun pemberian bantuan desa untuk organisasi kemasyarakatan desa.

4. Pelibatan organisasi kemasyarakatan desa dalam proses-proses pengambilan kebijakan publik yang diselenggarakan pemerintah desa.

Berangkat dari kesadaran bersama sebagai entitas, desa tidak hanya terdiri dari pemerintah desa, tapi ada elemen masyarakat yang salah satunya terwakili melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, maka setiap kebijakan strategis desa hendaknya dilandasi atas musyawarah mufakat semua elemen desa. Di samping itu salah satu yang menjamin peran dinamis organisasi masyarakat sipil di desa adalah pelibatan mereka ke dalam arena perumusan dan pengambilan kebijakan desa. Melalui cara ini, secara tidak langsung pemerintah desa telah mengedepankan prinsip penghormatan, partisipasi dan emansipasi warga dalam pembangunan. Dari sinilah nanti akan lahir proses *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ada cukup banyak cerita kemandirian desa yang ditopang oleh kecakapan pemerintahan desa karena proses interaksi yang dinamis. Buku ini mungkin belum berhasil menyajikan cara atau tips-tips sederhana



Sarang walet

dan jitu bagaimana membangun desa mandiri. Tapi tetap berupaya menyajikan pengalaman prakarsa dan inovasi lokal yang mungkin bisa ditiru dan diterapkan di desa-desa lainnya. Narasi *best practices* yang berupaya dimunculkan dibuku ini tentu bukanlah diskursus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana teori-teori besar pembangunan. Meski demikian, pertikan-pertikan prakarsa lokal tetap memberikan pembelajaran berharga. UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memiliki sinergi dengan Nawa Cita sebagai *pandom* kebijakan pembangunan nasional memberi peluang bagi bekerjanya prakarsa-prakarsa lokal menuju desa mandiri.

Maka dari itu langkah bijaksana untuk membangun desa mandiri adalah dengan melaksanakan peta jalan “desa membangun” sebagaimana telah terstruktur dalam UU Desa dan Nawa Cita tersebut. Langkah sederhananya pertama, mendorong lahirnya warga dan organisasi warga desa yang kritis, peduli dan berinteraksi dinamis dengan proses-proses pengambilan kebijakan pembangunan desa. *Kedua*, menjalankan sistem perencanaan dan penganggaran desa yang partisipatif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. *Ketiga*, memberdayakan lembaga dan kelembagaan ekonomi desa yang inklusif. Tambahan pula, kesuksesan pencapaian desa mandiri dilain pihak juga ditopang oleh implementasi system perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran desa yang partisipatif, tertib, efektif, efisien dan disertai monitoring yang baik.

Strategi Membangun Kawasan Pedesaan

Membangun kemandirian desa dalam kerangka Desa Membangun harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik. Kemudian, diikuti dengan tata kelola program yang baik dan terencana pula. Pembangunan kawasan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil coba-coba.

Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa. Proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa merupakan wujud nyata dari kewenangan mengatur dan mengurus pembangunan desa yang berskala lokal desa.

Dalam menyusun sebuah rencana yang baik, harus didukung oleh sejumlah data dan informasi yang memadai. Tujuannya, agar rencana yang disusun dapat memecahkan masalah yang ditemui atau dialami masyarakat desa melalui potensi yang dimiliki. Permasalahannya adalah jenis data apa yang dibutuhkan, sumber informasi, jenis dan kedalaman data, bagaimana cara memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu dalam menyusun strategi pembanguna desa dapat melihat beberapa unsur seperti pemahaman tentang kondisi umum masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah tentang keterlibatan masyarakat. John C. Maxwell, seorang penulis buku psikologi populer “*25 Ways to Win with People*” menuliskan bahwa keterlibatan seseorang akan muncul jika seseorang tersebut sudah memahami dirinya sendiri. Terdapat hambatan-hambatan sehingga seseorang tidak berani bahkan hanya sekedar untuk mengetahui saja banyak yang tidak bersedia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor psikologis, faktor ekonomi dan faktor budaya.

Hal lain yang harus diketahui adalah tentang metode pemecahan masalah bersama masyarakat. Beberapa pengalaman telah menunjukkan bahwa untuk melakukan pemecahan masalah bersama masyarakat, dilakukan dengan tahapan-tahapan:

1. Sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk bekerjasama. Hasilnya berupa kesepakatan dan komitmen antara masyarakat dan fasilitator;
2. Kesepakatan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan data, menggunakan metode dan teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA), survei, dan observasi;
3. Data yang dikumpulkan menjadi Profil, yang menggambarkan keadaan terkini, berupa rangkaian angka (data kuantitatif) dan rangkaian kata-kata (data kualitatif);
4. Profil menjadi lebih bermakna melalui analisis yang dilakukan secara partisipatif maupun melalui analisis statistik. Hasil analisis, kemudian menjadi bahan dasar untuk menyusun rencana kegiatan (untuk memecahkan masalah), dan sebagai bahan dasar untuk mendisain program stimulasi untuk mempertahankan kerjasama, dan;
5. Pada akhirnya, secara bersama-sama akan menemukan program utama, dengan dimensi waktu tahunan atau multi tahun, bagaimana bersinergi



Perkebunan jeruk

dengan berbagai pihak yang bekerja bersama masyarakat, melalui beberapa bentuk pembiayaan dan kegiatan. Proses ini dapat dilihat dalam bentuk bagan alir pada lampiran.

Pembuatan Sketsa Desa

Dalam pembuatan sketsa desa, informasi umum yang akan digali, menyangkut sebaran pemukiman penduduk, letak pasar, sekolah, tempat ibadah, keadaan jalan, sumber air, fasilitas kesehatan, fasilitas perikanan, sumber daya pertanian, SD Perkebunan, SD Kehutanan, fasilitas sosial/umum, sebaran kelompok, dan lain-lain. Selain itu, dalam sketsa desa harus mencakup tentang masalah- masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan. Berdasarkan informasi umum yang diperoleh dari pembuatan sketsa desa, dilakukan diskusi terfokus (FGD/*Focus Group Discussion*), menyangkut antara lain:

1. **Analisis Mata Pencaharian**, menyangkut: Jenis dan sumber mata pencaharian, mata pencaharian pada musim paceklik, pelaku utama (laki/perempuan) pada jenis dan sumber mata pencaharian, kontribusi per jenis mata pencaharian terhadap pendapatan keluarga,

- pasar dan pemasaran, pemanfaatan hasil, teknologi yang digunakan, peralatan pendukung (jenis, jumlah). Masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan;
2. **Kalender Musim**, menyangkut waktu peroleh penghasilan dan pendapatan, waktu panen raya dan panen sedikit, aktifitas/kegiatan yang berhubungan dan tidak berhubungan dengan usaha perikanan yang penting, keterlibatan (laki/perempuan). Sebagai pendukung, melakukan diskusi menyangkut kalender kegiatan harian pada saat panen raya dan panen sedikit dan mencatat masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan;
 3. **Bagan Alir**, tataniaga hasil perikanan, pendapatan dan pengeluaran, *prossesing* hasil dan ikutan hasil produksi lainnya, Masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan;
 4. **Matrix Ranking**, menyangkut mekanisme pemilihan pengurus kelompok, ranking pendapatan, ranking pilihan usaha yang mungkin dikembangkan, kriteria menurut sasaran. Masalah-masalah yang ada dan upaya pemecahan yang telah dilakukan;
 5. **Diagram Venn**, untuk mengidentifikasi organisasi, kelompok atau perorangan yang berhubungan dengan masyarakat, baik hubungan secara ekonomis maupun hubungan sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Untuk mengoordinasikan pembangunan Desa, kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain akan melakukan koordinasi pendampingan di wilayahnya.



Salah satu warung warga

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kedua rencana tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RPJM Desa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan

desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antar lain penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang Desa; penyelenggaraan musyawarah Desa, pengelolaan informasi desa, penyelenggaraan perencanaan desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, penyelenggaraan kerjasama antar desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor desa dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, yang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah dan pembentukan tim penyusun RKP Desa serta pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program.

Daftar Pustaka

- Perencanaan Pembangunan Desa, Wahyudin Kessa, Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Maret, 2015 .
- Buku Desa Mandiri, Desa Membangun, Borni Kurniawan, Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Maret, 2015.
- Profil Desa Peduli Gambut, Sei Baru Tewu, Kecamatan maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, BRR, Kemitraan Patnership, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, Epistema Institute, 2018

Sei Baru Tewu

Menuju Konsep Desa Berkelanjutan

Desa Sei Baru Tewu, Kec. Maluku

Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah